

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Solopos
Media Online

Wilayah: Kota Surakarta

Halaman 9 dan VII

Pemkot Ajukan Pelepasan Lahan 3 Kantor Partai

SOLO—Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bakal mengajukan pelepasan lahan hak pakai (HP) daerah yang saat ini dikuasai tiga partai besar zaman Orde Baru.

Mariyana Ricky P.D.
redaksi@solopos.co.id

Lahan yang ditempati sejak 1980-an itu kini menjadi Kantor Partai

- ▶ **Desakan penghibahan lahan bertujuan ketertiban administrasi.**
- ▶ **Pemkot juga akan merampungkan aset TPU Daksinoloyo dan Pracimaloyo.**

Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Aset tersebut sempat dibahas dalam koordinasi yang dibahas Pemkot bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo,

mengatakan pelepasan bakal diajukan ke legislatif untuk dibahas. Kantor PPP berada di Semanggi, Pasar Kliwon, Kantor Partai Golkar di Punggawan, Banjarsari, dan Kantor PDIP di Purwosari, Laweyan.

Bersambung ke Hal. VI Kol. 1

“Saat ini statusnya masih HP Pemkot. Saya minta agar itu lepas, dihibahkan untuk partai. PPP, Golkar, dan PDI yang sekarang PDIP. Biar jelas statusnya. Dulu kan tiga partai itu diberi fasilitas oleh negara, sampai sekarang juga masih dimanfaatkan,” kata Rudy, kepada wartawan, pekan lalu.

Lahan yang ditempati Partai Golkar, lanjutnya, berukuran paling luas. Hal itu bisa dimaklumi karena saat itu partai yang berkuasa saat itu berasal dari Golkar.

“Paling kecil, ya, Kantor PDI, lha nomor 3. *Wis kecil, nang cedak makam* [udah kecil, di dekat makam] juga. Tapi apa

pun itu ya dimanfaatkan sebaik mungkin,” terang Ketua DPC PDIP Solo tersebut.

Desakan penghibahan lahan bertujuan ketertiban administrasi. Selama ini aset tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) aset Pemkot yang tidak diperuntukkan bagi Pemkot.

“Daripada mengganjal seperti itu, lebih baik dilepas. Peruntukannya juga jelas. Toh nantinya juga untuk masyarakat,” kata dia. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Solo, Yosca Herman

Soedrajad, mengatakan selain tiga aset tersebut, Pemkot juga berupaya merampungkan kepemilikan aset bermasalah yang lokasinya di luar daerah.

Di antaranya, tempat permakaman umum (TPU) Pracimaloyo dan Daksinoloyo masing-masing seluas 145.000 meter persegi dan 158.000 persegi.

“Kami konsultasi ke Pemprov Jateng terkait aset-aset itu. Nota sudah kami kirimkan dan akan dibahas. Mereka meminta waktu untuk membahas persoalan tersebut. Harapannya, segera menjadi milik kami, karena selama ini kami yang memanfaatkan,” ucap Herman, dihubunginya, Selasa (25/8).